



EXECUTIVE SUMMARY

**DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur selalu kita sampaikan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik. Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) ini dilandasi oleh amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi tentang kondisi lingkungan kepada masyarakat luas.

DIKPLHD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 di susun dalam 2 (dua) buku. Buku I menyajikan ringkasan eksekutif dari IKPLHD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018. Buku II berisikan laporan utama IKPLHD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018. Laporan utama berisikan analisa hubungan kausalitas antara unsur-unsur pemicu, penyebab terjadinya persoalan lingkungan hidup, status, akibat dan upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan (*Driving Force, Pressure, State, Impact dan Response Analysis / DPSIR*).

Dokumen ini dapat berfungsi sebagai sarana penyediaan data dan informasi pengelolaan lingkungan hidup bagi masyarakat. Selain itu, dokumen ini oleh pemerintah daerah dapat digunakan untuk membuat kebijakan dan peraturan, terutama yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat diwujudkan.

Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Untuk mencapai keberlanjutan yang menyeluruh, diperlukan keterpaduan antara 3 (tiga) pilar pembangunan, yaitu keberlanjutan dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Untuk itu, tiga aspek tersebut harus diintegrasikan dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar tercapai tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Kunci utama pembangunan berkelanjutan adalah menjaga lingkungan hidup atau ekologi dari kehancuran atau penurunan kualitas, dan tetap menjaga keadilan sosial dengan tidak mengorbankan kebutuhan pembangunan secara ekonomi.

Akhir kata, Dokumen IKPLHD ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat akan memperoleh haknya terhadap akses informasi lingkungan hidup dan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dijadikan acuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengambilan keputusan, dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis, dan Sejahtera. Kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penyusunan dokumen ini, saya ucapkan terima kasih.

Painan, 25 April 2019

BUPATI PESISIR SELATAN



HS HENDRAJONI, S.H.,M.H.



BUPATI PESISIR SELATAN

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 660/194/DLH-PS/2019

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. HENDRAJONI, S.H.,M.H.**

Jabatan : **BUPATI PESISIR SELATAN**

Menyatakan bahwa penetapan isu prioritas lingkungan hidup pada Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat telah didasarkan pada proses yang partisipatif dan melibatkan para pemangku kepentingan di wilayah kami.

Adapun isu prioritas lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud adalah :

1. Aktivitas Illegal Logging.
2. Pengelolaan Sampah.
3. Rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar bisa digunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 25 April 2019



H. HENDRAJONI, S.H.,M.H.



EXECUTIVE SUMMARY

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa dalam pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Jika belum dilakukan penyusunan RPPLH maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH). Selanjutnya Undang-Undang tersebut mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Diwajibkannya pemerintah membuat ketiga dokumen perencanaan lingkungan hidup tersebut mengindikasikan telah adanya peningkatan kualitas perencanaan lingkungan hidup.

Dengan meningkatnya kualitas perencanaan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan, maka dalam implementasi dan pemanfaatan sumber daya alam perlu diiringi dengan peningkatan fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi. Selanjutnya untuk melengkapi fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi lingkungan hidup serta melengkapi informasi untuk masyarakat maka perlu disusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD). Informasi yang disajikan merupakan hasil analisis dari data-data dan isu-isu prioritas lingkungan hidup melalui metode analisa hubungan kausalitas antara unsur-unsur pemicu, penyebab terjadinya persoalan lingkungan hidup, status, akibat dan upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan (*Driving Force, Pressure, State, Impact dan Response Analysis / DPSIR*).

1. Profil Kabupaten Pesisir Selatan dan Kekhasan Kondisi Ekologis

Secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan berada pada 0°59'-2°28,6' Lintang Selatan dan 100°19'-101°18' Bujur Timur, memiliki batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu, sebelah utara berbatasan dengan Kota Padang, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan dan





Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Sementara secara administrasi, Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 wilayah Kecamatan, 182 Nagari dan 480 Kampung.

Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2018 adalah sebanyak 507.704 jiwa. Dibandingkan jumlah penduduk tahun sebelumnya, telah terjadi pertambahan penduduk sekitar 6.507 jiwa atau 1,28 %. (Disdukcapil Kabupaten Pesisir Selatan, 2018).

Kondisi iklim di Kabupaten Pesisir Selatan cenderung berawan dan musim hujan. Adapun kondisi topografi wilayah, berbukit dengan ketinggian berkisar 0-1.000 m dari permukaan laut, memiliki keberagaman kemiringan lereng berkisar antara 0 - 40 persen dan > 40 persen. Sementara fisiografi wilayah terbentuk dari perpaduan antara proses patahan pegunungan Bukit Barisan ke arah barat dan proses aluvial marine. Dari sisi geologis daerah ini termasuk pinggir dari patahan semangko yang membujur dari utara ke selatan.

Salah satu kekhasan ekologi Kabupaten Pesisir Selatan adalah di satu sisi ditutupi oleh hutan dan di sisi lain berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Kekhasan lainnya adalah daerah ini memiliki garis pantai yang sangat panjang yaitu 234 Km. Di samping itu memiliki pulau-pulau kecil sebanyak 53 buah pulau. Keberadaan laut dan pantai sebagai habitat hewan dan tanaman yang dilindungi, juga berpotensi untuk pengembangan bidang pariwisata bahari.

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 22 sungai besar dan sungai kecil. Rata-rata sungai yang berada di Pesisir Selatan hulunya berasal dari kawasan Hutan Suaka Alam Wisata (HSAW) dan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Secara umum wilayah Kabupaten Pesisir Selatan rawan gempa dan tsunami karena terletak di wilayah seismik aktif yaitu pertemuan antara dua lempeng tektonik aktif euroasia dan indo-australia. Bencana lain yang mengancam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan adalah potensi terjadinya banjir, baik banjir biasa maupun banjir bandang.

2. Analisis *Driver Force, Pressure, State, Impact, dan Response* Isu Lingkungan Hidup Daerah

2.1 Tataguna Lahan

Isu lingkungan strategis yang berkaitan dengan tataguna lahan





adalah alih fungsi lahan.

2.1.1 Faktor Pemicu (*Driver Force*)

Di Kabupaten Pesisir Selatan faktor pendorong alih fungsi lahan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dapat dilihat dari perkembangan jumlah penduduk 5 (lima) tahun terakhir diaman setiap tahun terjadi penambahan penduduk rata-rata sebesar 3.651 jiwa (0,81%).

Faktor pemicu lainnya adalah pembangunan infrastruktur jalan yaitu pembangunan ruas jalan Painan Tapan sepanjang 200 Km dan Kawasan Wisata Mandeh sepanjang 50 Km. Pembangunan jalan tersebut akan meningkatkan permintaan material berupa batuan dan pasir. Jika pengambilan material tersebut tidak memperhatikan aspek lingkungan akan menimbulkan gangguan terhadap lahan yaitu munculnya lahan akses terbuka.

2.1.2 Tekanan (*Pressure*)

Perubahan tataguna lahan di Kabupaten Pesisir Selatan akibat adanya kegiatan pertambangan, alih fungsi lahan menjadi pemukiman, kerusakan kawasan hutan akibat perambahan dan pembalakan liar, pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan dan kerusakan wilayah pesisir, terumbu karang dan mangrove.

2.1.3 Kondisi Lahan dan Statusnya (*State*)

a. Kawasan Lindung berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahan

Kawasan lindung berdasarkan RTRW sebesar 55% (318.725 Ha) dari total luas Kabupaten Pesisir Selatan 579.495 Ha. Sementara kondisi lahan akibat berbagai tekanan cenderung mengalami penurunan. Namun status tutupan lahan masih berada dalam kategori baik dengan indeks tutupan lahan pada tahun 2018 sebesar 74,86.

b. Wilayah menurut Penggunaan Lahan Utama

Penggunaan lahan utama di Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk perkebunan, lahan kering, lahan non pertanian, hutan, lahan sawah dan badan air. Dengan penggunaan lahan terluas adalah sektor perkebunan seluas 74.198 Ha.

c. Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status

Luas hutan di Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan fungsi seluas 312.818,45 Ha dan berdasarkan status sebesar 434.252,56 Ha.





Dibandingkan dengan luas hutan di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 dengan tahun 2011 berdasarkan fungsi, telah terjadi pengurangan kawasan hutan seluas 34.319 Ha. Kawasan Suaka Alam / Kawasan Pelestarian Alam (KSDA & TNKS) terjadi pengurangan 21.197 Ha. Hutan lindung terjadi pengurangan 26.346 Ha. Hutan produksi terbatas berkurang 16.169 Ha. Akan tetapi hutan produksi bertambah 506 Ha dan hutan produksi konversi bertambah 28.887 Ha.

d. Keadaan Flora dan Fauna di Kabupaten Pesisir Selatan

Hilang dan beralih fungsinya wilayah hutan di Kabupaten Pesisir Selatan atau perburuan liar dan penebangan liar, akan mengancam keberlangsungan hidup spesies di dalamnya. Hal ini dapat di lihat dari laporan UPTD Kehutanan Provinsi Sumatera Barat ada 6 (enam) kali tangkapan kayu di Kabupaten Pesisir Selatan yang berada di wilayah hutan lindung dan TNKS

e. Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan

Luas lahan kritis di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar 318.017 Ha. Terjadinya lahan kritis di Kabupaten Pesisir Selatan sangat erat kaitannya dengan adanya kegiatan pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan seperti perladangan oleh masyarakat setempat, serta adanya perambahan dan pembalakan liar.

f. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air

Kondisi kerusakan tanah di Kabupaten Pesisir Selatan akibat erosi air dengan pengambilan sampel tanah di PT. Incasi Raya di Kecamatan Lunang yang merupakan kawasan perkebunan kelapa sawit. Kondisi kerusakan tanah di lahan kering akibat erosi air di Kabupaten Pesisir Selatan masih berada di bawah baku mutu.

g. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan kering

Evaluasi kerusakan tanah lahan kering dilakukan di Kecamatan Koto XI Tarusan Nagari Sungai Tawa pada usaha perkebunan jeruk oleh masyarakat setempat. Kualitas tanah di lahan kering masih termasuk kategori agak rusak untuk sebagian parameter meskipun untuk sebagian parameter masih terkategori baik. Sehingga perlu adanya upaya upaya yang dilakukan untuk mencegah kerusakan tanah.



h. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah

Lahan basah yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan salah satunya adalah lahan gambut. Luas lahan gambut berdasarkan RTRW Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 14.000 Ha. Evaluasi kerusakan tanah di lahan basah yang dilakukan di PT. Incasi Raya Kecamatan Lunang masih berada di bawah baku mutu.

i. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove

Hutan mangrove di Kabupaten Pesisir Selatan memiliki luas 1.911,26 Ha dengan persentase tutupan 31,34% dan kerapatan pepohonan 1.110 batang/ha. Dibandingkan dengan luas pantai Kabupaten Pesisir Selatan, maka hutan mangrove hanya 0,42%.

j. Luas dan Kerapatan Padang Lamun

Luas padang lamun di Kabupaten Pesisir Selatan diperkirakan 17 Ha dan mengalami kerusakan sebesar 24%. Kerusakan padang lamun disebabkan oleh aktivitas pengerukan dan penimbunan yang dilakukan di sekitar wilayah pesisir seperti pembanunan jalan, perumahan atau pembangunan sarana dan parasarana pariwisata. Penangkapan ikan dengan trawl dan lainnya yang merusak padang lamun serta kerusakan oleh penduduk setempat yang tidak mengetahui banyak fungsi ekologis padang lamun.

k. Luas dan Kerapatan Terumbu Karang

Terumbu karang di Kabupaten Pesisir Selatan tersebar di Kecamatan Koto XI Tarusan dengan luas tutupan 1.800 Ha, Kecamatan IV Jurai 410 Ha, dan Kecamatan Batang Kapas 155 Ha. Kondisi terumbu karang di Kabupaten Pesisir Selatan cukup memprihatinkan, 52,78% dari terumbu karang berada dalam kondisi rusak, 19,78 kondisi sedang, 17,55% kondisi baik dan hanya 9,92% yang berada dalam kondisi sangat baik.

l. Luas Perubahan Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan tidak mengalami perubahan di bandingkan dengan tahun 2017. Usaha perkebunan merupakan paling besar dalam penggunaan lahan sebesar 48,70%, selanjutnya pemukiman 18,69%, tanah kering 14,62%, Perairan/kolam 9,48%, semak belukar 4,87%, lainnya 3,61% dan industri 0,03%.



m. Luas Pemanfaatan Lahan

Jenis pemanfaatan lahan untuk pertambangan merupakan IUP Mineral bukan logam / Mineral Batuan Sungai sebanyak 9 IUP. Sedangkan perkebunan terdapat 8 Izin Usaha Perkebunan dengan usaha perkebunan kelapa sawit, untuk perkebunan rakyat terdiri dari perkebunan kelapa sawit, kelapa dalam, karet gambir, kakao, pala, cengkeh, dan lain-lain.

n. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian

IUP yang ada ini masuk dalam kategori skala usaha kecil dengan total luas 250,64 Ha. Produksi pertambangan yang di hasil berupa galian C, dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan material peningkatan jalan nasional Painan sampai Tapan dan pembangunan jalan Kawasan Wisata Bahari Mandeh sampai ke Padang.

2.1.4 Dampak Perubahan Tata Guna Lahan (*Impact*)

Dampak perubahan tataguna lahan adalah permasalahan pada sumberdaya air. Dampak langsung yang dirasakan akibat adanya permasalahan pada sumber daya air adalah bencana banjir. Pada daerah perbukitan dan pegunungan penggunaan lahan yang tidak sesuai menimbulkan tanah longsor atau tanah bergerak.

Hal ini dapat dilihat, pada tahun 2018 terjadi banjir pada 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan. Luas area yang terendam sebesar 240 Ha dengan kerugian materi Rp. 1.030.000.000,-. Bencana tanah longsor terjadi di 5 (lima) kecamatan dengan kerugian materi Rp. 175.000.000,-.

2.1.5 Upaya Pengelolaan yang Dilakukan (*Response*)

Upaya penanggulangan kerusakan lingkungan dilakukan diantaranya melalui penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan lingkungan hidup di Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan kepada pelaku yang melakukan kerusakan lingkungan hidup di Kawasan Wisata Bahari Terpadu (KWBT) Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan yang melakukan perusakan wilayah pesisir, perusakan hutan mangrove, terumbu karang dan melakukan usaha tanpa izin lingkungan. Penegakan hukum juga dilakukan bagi pelaku penebangan pohon tanpa izin (*Illegal Logging*) di



Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Lunang, Linggo Sari Baganti dan Lengayang

Upaya pemulihan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan melalui :

- Restorasi dan rehabilitasi dilakukan terhadap kerusakan hutan mangrove yang dilakukan di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Sutera dan Kecamatan Ranah Pesisir. Pelaksanaan Reklamasi dilakukan pada usaha pertambangan batuan sungai serta pembangunan Irigasi Batang Tarusan.
- Transplantasi terumbu karang dilakukan di Kecamatan Koto XI Tarusan di Pulau Seronjong Gadang, Pulau Setan, dan Pulau Pagang. Transpalantasi Terumbu Karang juga dilakukan di Kecamatan IV Jurai yaitu di Pulau Aua.
- Upaya memulihkan fungsi dan manfaat ekosistem pesisir sebagai jalan hijau (green belt) melalui penanaman cemara laut (*Casuarina equisetifolia*) disepanjang pesisir pantai yang dilakukan di Pantai Sago Kecamatan IV Jurai 2.000 batang.
- Upaya reboisasi tidak terlaksana di Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan upaya penghijauan dilakukan dengan penanaman pohon sebanyak 209.301 batang bibit kayu-kayuan di Kecamatan IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti.

2.2 Kualitas Air

Secara umum kualitas air di Kabupaten Pesisir Selatan masih baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Kualitas Air Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 85 (tergolong masih bagus). Namun berdasarkan hasil pemantauan sebagian besar sungai di Kabupaten Pesisir Selatan dalam kondisi tercemar sedang.

2.2.1 Faktor Pemicu (*Driving Force*)

Peningkatan jumlah penduduk dan berbagai aktivitasnya menjadi faktor pemicu turunya kualitas sungai di Kabupaten Pesisir Selatan. Dimana di tahun 2018 diketahui pertumbuhan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan 2%. Sementara aktivitas masyarakat yang menjadi faktor



pemicu utama adalah aktivitas pemukiman dan pertanian.

2.2.2 Tekanan (*Pressure*)

Masyarakat yang bermukim di sekitar sungai menjadikan sungai sebagai halaman belakang rumah sehingga sungai menjadi tempat penampungan limbah domestik baik cair maupun padat. Ditambah lagi belum memadainya bangunan IPAL komunam yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

2.2.3 Kondisi Eksisting Kualitas Air (*State*)

a. Kondisi Sungai

Berdasarkan hasil pemantauan DLH tahun 2018 diketahui hanya dua buah sungai yang berstatus memenuhi baku mutu air yaitu Salido, Tapan dan Lunang (bagian hulu) dan sisanya berstatus tercemar ringan. Adapun sungai-sungai yang tercemar ringan adalah Batang Tarusan, Bayang, Salido (Hilir), Batang Kapas, Kambang, Tapan, dan Lunang.

b. Kondisi Air Sumur

Kondisi air sumur di Kabupaten pesisir Selatan masih memenuhi baku mutu.

c. Kondisi Air Laut

Secara umum kualitas air laut dalam kondisi baik. Namun ada beberapa parameter yang tidak memenuhi baku mutu yaitu TSS sebesar 645 mg/L. Hal ini kemungkinan ada pembukaan lahan untuk pembangunan jalan di Kecamatan Koto XI Tarusan di pinggir danau sehingga kondisi tanah yang belum stabil di sekitar pantai ikut menyumbang bahan pencemar.

d. Kondisi Air Embung

Kondisi air embung di Kabupaten Pesisir Selatan masih memenuhi baku mutu. Hal ini didukung oleh lokasi embung berada jauh dari pemukiman dan kawasan hutan sekitar embung masih terpelihara.

e. Kondisi Air Limbah

Kondisi air limbah industri-industri di Kabupaten Pesisir Selatan masih memenuhi baku mutu sehingga keberadaan industri belum memberikan sumbang bahan pencemar ke wilayah sungai.



2.2.4 Dampak Penurunan Kualitas Air (*Impact*)

Belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi. Namun pada aspek ekologi penurunan kualitas air akan mengganggu keseimbangan ekosistem perairan sungai.

2.2.5 Upaya Pengelolaan yang dilakukan (*Response*)

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi penurunan kualitas air di Kabupaten Pesisir Selatan adalah penanaman bambu di sempadan sungai, melakukan pengawasan rutin ke industri yang melakukan pembuangan limbah ke sungai, pengerukan sungai, pembangunan IPAL komunal, program ODF/Stop Buang Air Besar Sembarangan, penanaman mangrove dan aksi-aksi kelompok peduli lingkungan melakukan pembersihan pantai dan laut.

2.3 Kualitas udara

Indeks Kualitas Udara Kabupaten Pesisir Selatan masih tergolong baik yaitu sebesar 78,95% namun masih perlu diantisipasi dengan berbagai upaya di berbagai aspek.

2.3.1 Faktor Pemicu (*Driving Force*)

Faktor pemicu terjadinya pencemaran udara di Kabupaten Pesisir Selatan adalah aktivitas lalu lintas, tumpukan timbunan sampah baik yang di TPA maupun sekitar tempat penduduk, penggunaan pupuk kimia untuk pertanian, aktivitas rumah tangga dari kegiatan memasak dan pembakaran sampah.

2.3.2 Tekanan (*Pressure*)

Peningkatan jumlah kendaraan pribadi, kendaraan pengunjung wisata dan penambahan ruas jalan mengakibatkan peningkatan unsure pencemar yang dilepas ke udara dari pembakaran bahan bakar kendaraan. Di samping itu tumpukan sampah baik di sekitar tempat tinggal penduduk maupun di TPA akan menambah beban pencemar berupa gas metan dan menimbulkan bau. Sementara aktivitas pertanian sistem konvensional akan meningkatkan jumlah gas metan yang dilepas ke udara.

2.3.3 Kondisi Udara dan Statusnya

Kondisi udara ambient di Kabupaten Pesisir Selatan masih





memenuhi baku mutu dengan suhu udara rata-rata berkisar 26,14 s/d 32,28.

2.3.4 Dampak (*Impact*)

Dampak pencemaran udara yang dirasakan di Kabupaten Pesisir Selatan belum signifikan karena kualitas udara masih tergolong baik.

2.3.5 Upaya Pengelolaan (*Response*)

Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan kualitas udara di Kabupaten Pesisir Selatan adalah kebijakan terhadap kendaraan umum dan dinas untuk melakukan KIR kendaraannya di Dinas Perhubungan, penerapan Undang-undang U No 2 Tahun 2009 oleh polisi bahwa dilarang penggunaan knalpot kendaraan yang tidak standar, penanaman pohon pelindung di tepi jalan, sosialisai pengelolaan sampah, penambahan sarana persampahan, peningkatan jumlah sekolah adiwiyata, pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas industri-industri, teknologi SRI untuk pertanian sawah

2.4 Resiko Bencana

Isu utama kebencanaan di Kabupaten Pesisir Selatan di tahun 2018 ini yaitu banjir.

2.4.1 Faktor Pemicu (*Driving Force*)

Faktor pemicu bencana banjir di Kabupaten Pesisir Selatan adalah anomaly cuaca, curah hujan dan penebangan liar.

2.4.2 Tekanan (*Pressure*)

Faktor penyebab (*pressure*) peningkatan banjir di Kabupaten Pesisir Selatan adalah alih fungsi lahan dan dampak perubahan iklim. Penebangan pohon yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab mengakibatkan material tanah bersama bebatuan yang sudah tidak ada pengikatnya (akar Pohon) akan dengan mudah meluncur ke bawah kemudian membendung sungai dan akan terjadi banjir.

2.4.3 Kondisi Kebencanaan dan Statusnya (*State*)

Salah satu bencana banjir terbesar di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 adalah bencana banjir di daerah Basa Ampek Balia Tapan dan Ranah Ampek Hulu Tapan dengan cakupan 240 Ha. Banjir ini menyebabkan kerugian harta benda sekira 4 rumah rusak ringan,



kerusakan sarana dan prasarana berupa jembatan, sarana pendidikan yaitu terendamnya 1 sekolah SD dan 2 gedung sekolah SMP.

2.4.4 Dampak (*Impact*)

Dampak banjir besar di Kabupaten Pesisir Selatan mengakibatkan rusaknya aliran sungai, kerusakan sarana dan prasarana umum, menjangkitnya penyakit diare di masyarakat.

2.4.5 Upaya Pengelolaan (*Response*)

Upaya yang sudah dilakukan untuk mencegah banjir adalah peringatan dari BPBD kepada masyarakat untuk tidak tinggal di daerah zona merah, Kegiatan perbaikan tebing sungai atau normalisasi bantaran sungai dan pengamanan tebing sungai yang dilakukan Dinas PSDA, kelompok masyarakat yang peduli hutan yang dibentuk oleh TNKS, kegiatan penanaman hutan seluas 50 Ha di daerah Kecamatan Batang Kapas, Penanaman pohon bambu di aliran sungai yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup.

2.5 Perkotaan

Kawasan perkotaan di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan ibukota Kabupaten dan ibukota kecamatan-kecamatan.

2.5.1 Faktor pemicu (*Driving Force*)

Faktor pemicu permasalahan lingkungan di perkotaan adalah tingginya kepadatan penduduk.

2.5.2 Tekanan Terhadap Lingkungan (*Pressure*)

Kepadatan pendidikan dan gaya hidup masyarakat perkotaan memberikan tekanan kepada lingkungan perkotaan yang mengakibatkan berbagai permasalahan lingkungan perkotaan berupa pencemaran udara, air dan tanah.

2.5.3 Kondisi Lingkungan Perkotaan

Status kualitas air di daerah perkotaan berada pada kondisi tercemar ringan. Sementara untuk kualitas udara berada pada ambang batas baku mutu. Berkaitan dengan timbulan sampah sebagaimana kawasan perkotaan lain, kawasan perkotaan Pesisir Selatan cenderung masih tinggi.

2.5.4 Dampak (*Impact*)

Dampak tingginya timbulan sampah diperkotaan menimbulkan





pencemaran udara dan air.

2.5.5 Upaya Pengelolaan (*Response*)

Upaya pengelolaan yang dilakukan terhadap isu lingkungan perkotaan yaitu pembangunan IPAL komunal, pemeriksaan kendaraan (KIR) oleh Dinas Perhubungan, pembangunan gedung perkantoran baru dengan memperhatikan ventilasi dan mengurangi penggunaan AC, Implementasi Perda No 1 tahun 2016 tentang Trantip dengan salah satu pasalnya tentang pembuangan sampah sembarangan serta sangsi yang diberikan, Implementasi Perbub No 78 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, melaksanakan Sosialisasi dan Pembinaan ke Masyarakat tentang Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat, Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, Gerakan Penggunaan Kambuik pandan sebagai kerajinan local dalam rangka pengurangan kantong plastik, Gerakan Satu Nagari Satu Bank Sampah

2.6 Tata Kelola

Kebijakan daerah dalam menentukan arah tata kelola lingkungan hidup, akan berdampak terhadap keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan dimasa mendatang. Semua aturan dan kebijakan ini akan menjadi salah satu katalisator dalam menjaga dan memelihara keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Pesisir Selatan.

2.6.1 Faktor Pemicu (*Driving Force*)

Faktor pemicu masih belum memadainya tata kelola di bidang lingkungan hidup adalah kecilnya alokasi anggaran lingkungan hidup, kapasitas SDM di Bidang Lingkungan Hidup belum memadai, dan penambahan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi yang meningkatkan eksploitasi terhadap SDALH.

2.6.2 Tekanan (*Pressure*)

Tekanan terhadap tata kelola di bidang lingkungan hidup adalah adanya pengaduan dan keluhan masyarakat atas aktifitas yang mengeksploitasi alam. Sementara SDM yang tersedia di bidang lingkungan hidup belum memiliki keahlian yang memenuhi syarat dan memadai.



2.6.3 Status (*State*)

Personil di bidang lingkungan saat ini hanya berjumlah 20 orang yang status pegawai negeri dengan laki-laki sebanyak 9 orang dan perempuan sebanyak 11 orang. Jumlah ini sangat minimal, karena dengan jumlah jabatan struktural sebanyak 14 buah termasuk UPT Laboratorium, sehingga tidak semua pejabat struktural memiliki staf fungsional dibawahnya.

2.6.4 Dampak (*Impact*)

Dampak atas tata kelola lingkungan adalah lebih pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan penetapan, penetapan Kawasan dalam tata ruang daerah, kemampuan daya dukung dan daya tampung serta rencana pengelolaan sumber daya yang ada, yang muaranya adalah izin lingkungan. Dampak signifikan yang terjadi bisa dilihat dari intensitas pengaduan yang muncul dari masyarakat atas pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup.

2.6.5 Upaya Pengelolaan yang Dilakukan (*Response*)

Untuk meningkatkan fungsi-fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam bidang lingkungan hidup ini, dilakukan dengan:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan daerah dengan meningkatkan kemampuan personil yang bertugas dibidang lingkungan hidup, melalui Pendidikan dan pelatihan teknis.
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup, melalui pembinaan dan pengawasan atas kepatuhan dan ketaatan komitmen yang tertuang dalam dokumen lingkungan hidup, pada masing-masing pemilik kegiatan.
3. Menetapkan regulasi dibidang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan.

2.7 Lain-lain (Pembangunan Sumberdaya Manusia untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan)

Salah satu aspek sosial yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan adalah peningkatan pendidikan masyarakat. Tingginya tingkat pendidikan manusia akan mempengaruhi pola hidup dan kretivitas manusia. Kurangnya pendidikan juga membuat kerusakan lingkungan



sekitar semakin buruk. Kurangnya pendidikan membuat kebersihan sekitar menjadi semakin memburuk, karena kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan menjadi berkurang. Pada akhirnya berpengaruh pada kesehatan masyarakat dan lingkungan.

2.7.1. Faktor-faktor pemicu (*Driving Force*)

Rendahnya pendidikan masyarakat menjadi salah satu pemicu terjadinya berbagai permasalahan lingkungan.

2.7.2. Tekanan (*Pressure*)

Permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan seperti peningkatan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan pendidikan rendah serta kurangnya alternatif pekerjaan lain mengakibatkan ketergantungan yang tinggi terhadap sumberdaya alam, ketergantungan ini menimbulkan *pressure* terhadap sumberdaya alam itu sendiri. Di samping itu dengan pendidikan yang rendah dan miskin akan sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan sarana untuk hidup layak dan bersih. Akibatnya lingkungan yang akan menerima buangan yang akan menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

2.7.3 Status (*State*)

Pada tahun 2018 tingkat pendidikan terbanyak penduduk kabupaten Pesisir Selatan adalah tidak sekolah yaitu sebesar 36,372 % dari total jumlah penduduk. Sementara angka kemiskinan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan juga masih termasuk tinggi yaitu sekitar 36%. Hal tersebut sejalan dengan tingkat kesehatan masyarakat yang masih tergolong rendah dimana terjadi peningkatan jumlah penderita penyakit sebesar 10%.

2.7.4 Dampak (*Impact*)

Rendahnya pendidikan masyarakat akan menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang tidak bergantung dengan alam. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka akan mengeksplorasi alam. Sementara alam sudah semakin terdesak baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Akibatnya terjadi penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari tahun ketahun terjadi peningkatan timbunan sampah, bencana alam seperti banjir dan abrasi pantai di Kabupaten Pesisir Selatan.





2.7.5 Upaya Pengelolaan yang Dilakukan (*Response*)

- a. Memberikan bantuan-bantuan sosial oleh BAZ Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Memberikan beasiswa kepada siswa yang melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi
- c. Program Kabupaten Sehat sehingga pada tahun Kabupaten Pesisir mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Sehat
- d. CSR perusahaan sawit kepada masyarakat

3. Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah

Isu lingkungan hidup yang didapatkan dari analisa DPSIR (*Driving Force, Pressure, State, Impact, dan Response*) permasalahan lingkungan di Kabupaten Pesisir adalah sebagai berikut :

- a. Aktivitas *Illegal Logging*.
- b. Pengelolaan Sampah.
- c. Rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS).

4. Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Inovasi daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Kabupaten Pesisir Selatan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, LSM, Pengusaha/Swasta, sekolah dan komponen lain dalam meningkatkan pengelolaan lingkungan. Program-program inovasi yang dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah sosialisai pengelolaan sampah, pembangunan bank sampah di beberapa kecamatan dan rumah kompos di Pasar Inpres Painan, pengelolaan sampah dengan menggunakan perahu, program pengendalian banjir, pertanian organik, konservasi penyu, penanaman mangrove, teknologi biogas, pembangunan IPAL komunal, perlindungan hutan berbasis Nagari, pemanfaatan alat rekayasa pompa air (*hydran pump*) untuk lahan tadah hujan, pemanfaatan alat perekayasa pencacah pelepah kelapa sawit menjadi pakan ternak, inovasi sesuai dengan juknis.



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. Rohana Kudus Telp/Faks. (0756) 21509
PAINAN